

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Manusia adalah makhluk sosial dan politik. Sebagai makhluk sosial dan politik, tentunya segala aktivitas manusia tidak luput dari kegiatan sosial, di mana setiap kegiatannya tercipta interaksi antarindividu (Erar Yusuf, 2020). Manusia dianggap sebagai makhluk sosial dan politik karena memiliki sifat dan kecenderungan alamiah untuk hidup dalam komunitas dan terlibat dalam hubungan sosial yang kompleks. Kegiatan sehari-hari pun tidak luput dari interaksi antarindividu yang satu dengan yang lainnya. Misalnya mulai dari bangun tidur hingga aktivitas kuliah atau kerja, biasanya seseorang membutuhkan bantuan orang lain agar aktivitas mereka dapat terlaksana dengan baik. Hal tersebut pada akhirnya melahirkan situasi yang disebut sebagai kehidupan sosial.

Kehidupan sosial sendiri berarti suatu interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dalam suatu kelompok atau lingkungan yang berkoeksistensi dan saling berkomunikasi antara satu dengan yang lain hingga terjadinya sebuah simbiosis di antara lainnya (Sukma Islami, 2020). Lingkaran sosial sendiri sudah menjadi rumah bagi kebersamaan manusia dalam bermasyarakat. Tidak ada manusia yang bisa hidup tanpa saling ketergantungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Mulai dari lahir, anak-anak, remaja, hingga dewasa, semua fase tersebut dilalui manusia dengan bantuan dari luar atau individu lain. Sejak kecil kita sudah terbiasa hidup secara sosial. Tidak ada manusia yang dapat hidup mandiri secara total tanpa bantuan dari luar (Mariana, 2013). Oleh karena itulah kemudian tercipta suatu situasi yang disebut sebagai situasi politik.

Situasi politik suatu negara merupakan gambaran yang kompleks dari interaksi dinamis antara berbagai unsur, termasuk perebutan kekuasaan, pembuatan keputusan, dan pembentukan struktur sosial. Dalam konteks politik, masyarakat terlibat dalam proses perumusan kebijakan dan penentuan arah pembangunan.

Perebutan kekuasaan antaraktor politik, seperti partai politik dan kelompok kepentingan, menciptakan lanskap politik yang penuh tantangan dan dinamika. Proses pembuatan keputusan politik, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif, mencerminkan interaksi dan perundingan antara berbagai pemangku kepentingan yang memiliki pandangan dan tujuan yang beragam. Sistem nilai, ideologi, dan norma-norma yang dianut oleh masyarakat membentuk landasan moralitas dan etika dalam situasi politik. Keberhasilan dan keberlanjutan struktur kekuasaan, otoritas, dan regulasi bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat dalam proses politik. Faktor eksternal, seperti tekanan internasional dan dinamika geopolitik, juga turut memengaruhi dinamika situasi politik suatu negara. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam terhadap situasi politik menjadi kunci dalam membentuk kebijakan yang relevan dan responsif terhadap perubahan kompleksitas masyarakat dan dunia.

Pada hari ini, istilah “politik” menjadi suatu terminologi yang maknanya bersifat peyoratif. Ketika mendengar kata politik maka akan ada kemungkinan terbayang suatu tindakan seorang politikus atau politisi yang korup. Politik juga menjadi suatu pembahasan yang menarik karena sudah sangat lazim apabila politik dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan manusia (Bachruddin, 2018a). Terminologi politik pada asalnya diambil dari kata *polis* (dalam bahasa Yunani), yang artinya adalah negara. Secara holistik, politik itu menandakan suatu aktivitas yang dibuat, digunakan, dan dipelihara oleh sebuah sistem masyarakat yang bertujuan untuk menegakkan suatu peraturan normatif yang ada di dalam lingkungan masyarakat itu sendiri (Lihat: Pengertian dan Fungsi Partai Politik). Aristoteles sendiri menyebutkan politik sebagai sebuah "*master of science*". Namun ia tidak menyebutnya dalam konteks ilmu pengetahuan, melainkan sebagai sebuah kunci untuk memahami lingkungan. Menurutnya, pengetahuan tentang politik adalah kunci untuk memahami lingkungan tempat tinggal. Sedangkan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* atau KBBI, kita dapat menemukan definisi politik yang merupakan sebuah pengetahuan mengenai sistem kenegaraan, seperti sistem pemerintahan dan dasar pemerintahan (KBBI, 2023). Hal tersebut yang

menyebabkan politik bersifat diakronis, di mana pun ada negara maka di sana ada politik.

Politik telah banyak memengaruhi dan menarik perhatian para kaum intelektual di segala zaman. Sebagaimana hal tersebut, seolah tidak ada aspek dalam kehidupan manusia yang luput dari eksistensi politik (Schmandt, 2002a). Sebagai manusia, menjadi suatu keniscayaan bagi kita untuk berinteraksi dan berkomunikasi terhadap sesama untuk berkolerasi menuju kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Berkomunikasi, berinteraksi, dan berkolerasi pada dasarnya adalah suatu perbuatan politik. Hal-hal tersebut tentunya berlaku secara kontinuitas, tanpa terbatas oleh ruang dan waktu selama hidup di muka bumi. Hal ini tentunya menandakan bahwa eksistensi kita sebagai manusia, kapan pun dan di mana pun akan selalu bersentuhan dengan politik (Yusuf, 2012). Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah *political animal* atau hewan politik (Aristoteles, 2004). Di sisi lain, Thomas Hobbes mengatakan hal yang hampir serupa, yakni *homo homini lupus* atau manusia pemangsa manusia lainnya. Kedua pandangan tersebut jika kita perhatikan mempertegas definisi manusia sebagai makhluk politik, karena di mana pun ia berada maka manusia selalu berada di dalam eksistensi masyarakat politik.

Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional, juga memiliki sejarah yang kental dengan dunia perpolitikkannya. Mulai dari zaman prakolonial, zaman penjajahan Indonesia, masa Orde Lama Soekarno, masa Orde Baru Soeharto, masa reformasi hingga sekarang ini (Indonesia Investments Report, 2023). Berbagai arus politik selalu berubah-ubah mengikuti perkembangan dan kebutuhan di setiap zamannya. Berbeda situasi politik di zaman Orde Lama dan zaman kontemporer ini. Keberagaman latar belakang paradigma dari setiap wilayah telah melahirkan banyak framework berpikir individu atau sosial. Framework atau cara berpikir ini bukan semata-mata bersifat pragmatis bagi kebutuhan pribadi saja, melainkan juga meliputi beberapa hal atau kebutuhan bersama seperti sistem tata negara maupun kebijakan umum (Yusuf, 2012).

Mohammad Natsir (1908-1993) merupakan salah satu tokoh intelektual muslim yang berasal dari Indonesia. Ia merupakan salah satu tokoh yang telah

menginspirasi banyak orang di masa lalu dalam bidang politik. Berbagai kontribusi yang ia berikan kepada negara telah menjadikannya sebagai salah satu pahlawan nasional di Indonesia pada tahun 2008 lalu (Tabroni, 2017). Sebagai seorang politisi dan birokrat, ia telah banyak memberikan kontribusi untuk bangsa Indonesia. Salah satu kontribusi terbesar yang pernah ia berikan adalah mengenai mosi integral Natsir, di mana usahanya dalam memperjuangkan konsep tersebut telah membawa bangsa yang kita kenal ini menjadi sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sebelumnya sempat menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS). Konsep politiknya ini bersifat *theo-demokrasi*, yang mana menurutnya kehidupan bernegara itu harus mengandung Al-Qur'an dan Sunnah Rasul-Nya (Effendy, 2008). Sebagai seorang muslim, pendakwah, dan intelektual, ia pernah dipercaya untuk memimpin beberapa bidang penting baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Keterlibatannya dalam dakwah politik membuat namanya banyak dikenal oleh banyak tokoh-tokoh penting negara. Alasan ia banyak terjun ke dunia politik ialah karena menurutnya politik merupakan sarana yang baik bagi umat Islam untuk berdakwah dan berperan dalam aktivitas gerakan politik. Atas dasar teologisnya itulah yang merupakan basis dari metode dakwah politiknya selama masa Orde Lama hingga Orde Baru.

Etika politik Natsir mencerminkan pandangan dan prinsip-prinsip moral yang dianut oleh Mohammad Natsir, seorang tokoh politik dan intelektual Islam Indonesia. Dalam visinya terhadap etika politik, Natsir menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai moralitas dan etika Islam dalam konteks kehidupan politik. Baginya, etika politik tidak dapat dipisahkan dari ajaran agama dan tata nilai yang ada dalam Islam. Natsir memandang bahwa tindakan politik harus senantiasa mencerminkan keadilan, kesejahteraan bersama, dan kebenaran. Dalam pandangan etika politik Natsir, integritas dan kejujuran menjadi unsur kunci dalam kepemimpinan politik. Beliau menekankan pentingnya para pemimpin untuk berkomitmen pada prinsip-prinsip moral dan tidak terjebak dalam praktik-praktik yang melanggar norma-norma etika. Etika politik Natsir juga mencakup aspek kepedulian sosial, di mana pemimpin diharapkan untuk memperhatikan

kesejahteraan rakyatnya dan bertanggung jawab dalam menciptakan keadilan sosial (Bachruddin, 2018a).

Selain itu, etika politik Natsir menitikberatkan pada penegakan hukum yang adil dan transparan sebagai landasan utama dalam menciptakan masyarakat yang berkeadilan. Beliau menegaskan bahwa kebijakan politik harus selaras dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan nilai-nilai moral yang bersumber dari ajaran agama. Pandangan etika politik Natsir juga mencakup semangat kerjasama antarumat beragama dalam rangka menciptakan harmoni dan persatuan di dalam masyarakat. Beliau menekankan pentingnya menghindari konflik dan perpecahan yang dapat merugikan keutuhan bangsa. Dengan demikian, etika politik Natsir membawa kontribusi berharga terhadap pemikiran politik Indonesia, menggambarkan pandangan yang berbasis pada nilai-nilai moral dan spiritualitas Islam, serta menitikberatkan pada prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan kepedulian sosial sebagai landasan utama dalam pengelolaan kehidupan politik (Efendi, 2017).

Di masa kontemporer, kita dapat menyaksikan berbagai macam kondisi-kondisi politik melalui media sosial yang beredar secara masif di kalangan masyarakat. Para tokoh politik dengan segala kekuasaannya sering menunjukkan suatu kondisi yang disebut sebagai *conflict of interest*. Etika dan moral seakan-akan sudah tidak ada artinya. Mirisnya, banyak seorang politikus muslim yang mengabaikan landasan moral qur'aninya dalam berpolitik. Politik dijadikan alat untuk berkuasa sekuat-kuatnya dan menguasai orang-orang di bawahnya demi kepentingan golongan. Tidak jarang kita melihat realita sekarang, di mana orang-orang yang sudah memiliki kekuasaan malah menjadikan kewenangannya itu untuk bertindak semena-mena, atau kita kenal dengan istilah *abuse of power*. Mohammad Natsir meskipun merupakan seorang politikus dan birokrat, dalam sejarahnya terbukti tidak pernah menggunakan kewenangannya untuk bertindak semena-mena atau yang merugikan bangsa dan umat. Meskipun situasi historis pada masa itu terjadi rivalitas antara nasionalis sekuler dengan nasionalis agamis, namun justru Natsir tetap pada pendiriannya. Tetap menjaga etika yang berdasarkan

Al-Qur'an dan sunnah. Dengan kata lain, sejarah Natsir dapat mengcover sisi gelap dari seorang politikus kontemporer sekaligus membantah bahwa tidak semua seorang politikus itu buruk.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian yang berjudul “*Etika Politik M. Natsir dalam Politik Kontemporer*” ini akan mengeksplorasi lebih lanjut mengenai konsep etika politik Natsir terhadap situasi politik kontemporer.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti menemukan beberapa rumusan masalah yang dapat diteliti dan dieksplorasi lebih lanjut untuk diperjelas permasalahan yang ada. Permasalahan tersebut adalah apa konsep etika politik Natsir. Ketika kita berbicara mengenai politik, seringkali terbayang konotasi yang buruk. Politik yang seharusnya memegang kepentingan orang banyak dengan penuh tanggung jawab seringkali dijadikan sebagai alat untuk merebut kekuasaan dan memonopolinya demi kepentingan kelompok masing-masing. Begitulah realita yang terjadi di dunia perpolitikan saat ini. Tidak ada musuh yang abadi, yang abadi dalam politik adalah kepentingan. Etika dan moral para politisi pun dipertanyakan, apakah semua politisi bekerja hanya demi kepentingan pribadi dan kelompoknya saja dan tidak untuk kepentingan seluruh warga negara.

Natsir sebagai tokoh politik dan birokrat terkenal dengan sifatnya yang jujur dan amanah dalam mengemban jabatan. Ia juga dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk mengemban jabatan sebagai perdana menteri pertama di Indonesia. Meskipun memegang jabatan yang krusial di masa pemerintahan Soekarno, ia tidak memanfaatkan kekuasaannya itu untuk bertindak korup seperti kebanyakan politisi pada umumnya. Meskipun memiliki latar belakang seorang puritan, ia pun tetap mau berjuang dan berdakwah dalam dunia politik yang dikenal sangat kotor. Di sini peneliti menemukan suatu permasalahan dan pertanyaan mengenai etika politik Natsir. Peneliti akan mengeksplorasi lebih lanjut mengenai etika politik Natsir dalam

politik kontemporer yang penuh dengan kegelapan. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, ada pertanyaan penelitian yang akan dieksplorasi lebih lanjut:

1. Apa ideologi politik Natsir?
2. Apa prinsip-prinsip moral dan aktivitas politik menurut M. Natsir?
3. Bagaimana konsep tentang tanggung jawab dan kewajiban berpolitik menurut M. Natsir?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ideologi politik M. Natsir.
2. Untuk mengetahui prinsip-prinsip moral dan aktivitas politik menurut M. Natsir.
3. Untuk mengetahui konsep tentang tanggung jawab dan kewajiban berpolitik menurut M. Natsir.

### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Atas dasar tujuan yang peneliti lakukan dalam penelitian ini, peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini sekurang-kurangnya dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun secara praktis bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, berikut adalah beberapa manfaat dari penelitian ini:

#### **1. Manfaat secara teoretis**

Dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada para pembaca mengenai ideologi politik dan konsep etika politik Natsir, memperkenalkan tokoh pahlawan M. Natsir sebagai seorang politikus, birokrat, sekaligus pendakwah yang berjuang demi bangsa melalui jalur politik, serta mengetahui apakah konsep etika politik Natsir dapat menjadi jawaban atas permasalahan politik kontemporer.

## **2. Manfaat secara praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi penting bagi para peneliti lainnya yang ingin mengadakan penelitian lanjutan mengenai studi etika politik Natsir. Meskipun pembahasan mengenai tokoh Natsir sudah banyak dibahas, namun pembahasan mengenai konsep etika politik Natsir masih cukup sukar untuk ditemukan dalam berbagai referensi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai etika politik atau filsafat moral yang relevan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena untuk merealisasikan gagasan dan aktivitas politik harus memiliki landasan etis agar dapat bermanfaat bagi seluruh kehidupan masyarakat. Juga untuk membangun kesadaran bagi seluruh masyarakat bahwa harus senantiasa menghormati hak-hak orang lain agar pelaksanaan hak-hak tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Akhirnya, diharapkan dapat menjadi referensi bagi yang memiliki minat untuk mengkaji lebih lanjut mengenai etika politik Natsir.

## **E. Kerangka Berpikir**

Untuk mengetahui jalan permasalahan dalam penelitian ini, kita harus melihat terlebih dahulu mengenai dimensi politik secara teoretis dan realita di lapangan saat ini.

Politik merupakan ciri khas dalam kehidupan manusia. Dimensi politik adalah dimensi masyarakat secara keseluruhan. Karena dimensinya itu mencakup keseluruhan kepentingan masyarakat, maka sebuah keputusan haruslah bersifat politis yang memperhatikan kepentingan seluruh masyarakat. Suatu tindakan dapat dikatakan politis apabila menyangkut keseluruhan masyarakat. Untuk mencapai kesepakatan bersama, maka setiap kebijakan politis harus memiliki legitimasi etis. Oleh karena itu, hal tersebut harus memperhatikan landasan dasar dari etika politik (Magnis-Suseno, 2016a).

Namun, meskipun politik itu sendiri sebagai suatu sistem atau kebijakan yang dapat memberikan manfaat terhadap masyarakatnya, dalam realita hari ini

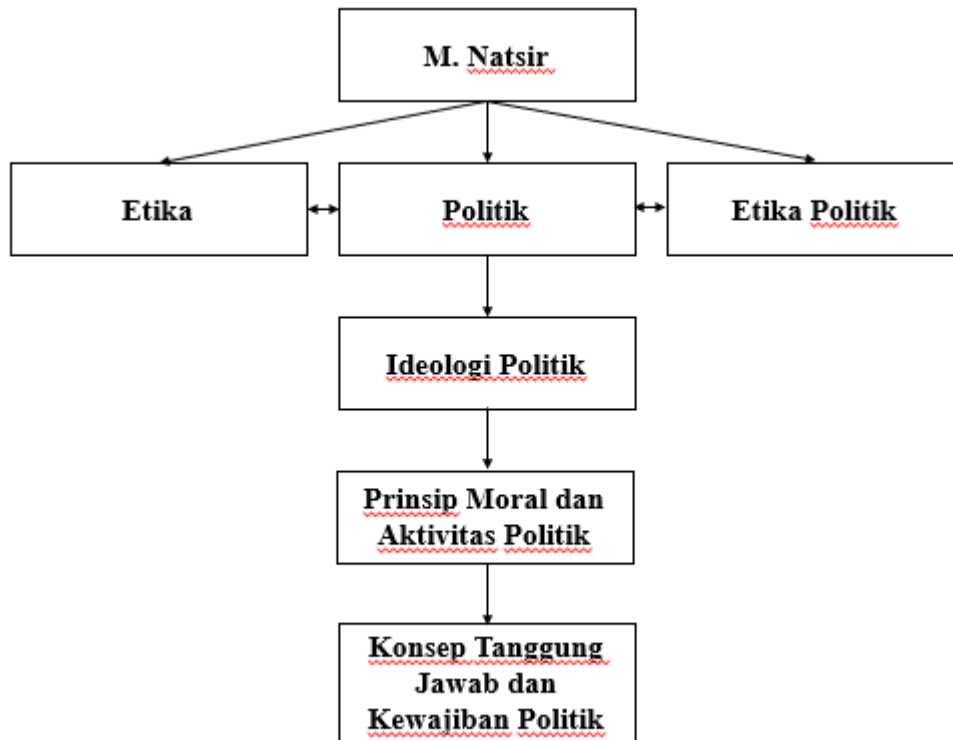


praktisnya masih banyak yang jauh menyimpang dari apa yang dicita-citakan. Salah satu contoh paling nyata dan jelas dari penyimpangan politik adalah marak terjadinya kasus korupsi (Sugiyono, 2023). Saat ini juga, realitas politik di Indonesia pada kenyataannya merupakan pertarungan kekuatan. Praktik politik di Indonesia tidak luput dari kekerasan, *money politics* dan korupsi, yang mana hal tersebut mendominasi warna kehidupan politik di Indonesia (Bachruddin, 2018a).

Sebagai filsafat praktis, dasar dari etika adalah mempertanyakan tanggung jawab manusia dan kewajiban manusia. Hal tersebut termasuk juga filsafat moral atau etika politik mengenai dimensi politis kehidupan masyarakat. Ketika berhadapan dengan kekuasaan, maka manusia dalam berpolitik harus dilandasi dengan moral agar dapat mempertanggungjawabkan kekuasaan (Magnis-Suseno, 2016b).

Sebagai sebuah manifestasi kekuasaan dalam suatu negara, mengimplementasikan politik harus dilandasi dengan moralitas yang selaras dengan nilai-nilai agama (Bachruddin, 2018a). Menurut M. Natsir, cita-cita manusia yang sejati adalah dengan menjadi hamba Allah SWT dalam arti yang sepenuhnya. Untuk sampai pada tingkatan tersebut, landasan etis manusia haruslah mengikuti aturan-aturan Tuhan, baik itu aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan maupun aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya (Natsir, 2022). Hal tersebut selaras dengan cita-cita politik M. Natsir mengenai pendidikan moral dan agama, yang diharapkan dapat menciptakan pemimpin dan warga negara yang bertanggung jawab dan bermoral secara politis.

Akhirnya, penelitian ini akan mengeksplorasi mengenai karakteristik pemikiran Natsir mengenai etika politik yang berlandaskan dengan agama dan dasar negara (Pancasila). Dalam hal itu juga, penelitian ini akan melihat relevansi pemikirannya terhadap situasi politik kontemporer di Indonesia.



*Gambar 1.1 Kerangka Berpikir*

### G. Hasil Penelitian Terdahulu

M. Natsir merupakan sesosok pemimpin dan pemikir terkemuka yang pernah ada di Indonesia. Gagasannya yang dikenal dengan "Mosi Integral Natsir" telah membawa manfaat persatuan yang sangat besar bagi bangsa ini. Manfaat tersebut dapat dirasakan bukan hanya oleh umat muslim saja, melainkan umat non-muslim di Indonesia pun turut merasakan manfaat persatuannya. Maka tidak heran jika pemikirannya itu banyak dibahas dalam tulisan-tulisan ilmiah dan menjadi obyek kajian para tokoh dan ilmuwan baik, baik itu dalam bentuk tema kajian, diskusi, seminar, tulisan, dan sebagainya.

Dalam hal ini, peneliti mengambil beberapa referensi mengenai etika politik Natsir dari jurnal-jurnal yang relevan dengan tema pembahasan. Hasil penelitian terdahulu ini tentunya sangat membantu penulis dalam melakukan penyusunan dan

pengolahan data. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang etika politik:

1. Disertasi Program Doktor (S3) Studi Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, yang ditulis oleh A. Bachruddin (2018) dengan judul "*Etika Politik M. Natsir*". Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan historis. Penelitian ini menemukan sebuah gagasan etika politik menurut Natsir, yang mana menurutnya merupakan landasan etis bagi kekuasaan. Gagasan tersebut muncul dilatar belakangi oleh rivalitas politik yang terjadi antara golongan nasionalis agamis dengan nasionalis sekuler yang terjadi pada tahun 1930-1940 mengenai gagasan disintegrasi antara agama dan negara. Ia menegaskan bahwasanya etika politik itu harus bersumber dari agama, yaitu moralitas yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Namun, etika politik yang berlandaskan Pancasila pun juga sesuai, sebab menurutnya Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Oleh karena itu, etika politik harus sesuai dengan Pancasila ataupun agama Islam.
2. Jurnal Program Studi PGMI yang ditulis oleh penulis gabungan, Sri Harda Yanti, M. Fatchurrohman, dan Herri Gunawan (2023), dengan judul "*Konsep Dakwah Politik Mohammad Natsir di Indonesia*". Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dan pendekatan sosio-historis. Penelitian ini menemukan beberapa hal penting dari rumusan masalah yang ada. Menurut Natsir, aktivitas dakwah dan politik adalah satu kesatuan penting bagaikan dua sisi mata koin. Dalam berdakwah, Natsir mengedepankan konsep modernisasi politik Islam, yang inti ajarannya itu adalah untuk menerapkan ajaran yang mengandung nilai-nilai kerohanian, sosial dan politik Islam yang sesuai dengan perkembangan zaman, namun dibatasi oleh sumber yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits.
3. Skripsi UIN Raden Intan Lampung, yang ditulis oleh A Fikri Thia Naufal (2020) dengan judul "*Etika Politik Menurut Mahfud MD dalam Perspektif Fiqh Siyasah*". Metode penelitian yang digunakan adalah metode library research. Penelitian ini menemukan bahwa Mahfud MD memandang etika politik sebagai kegiatan berpolitik yang harus berlandaskan Pancasila. Pandangannya terhadap Fiqh Siyasah dianggap sesuai karena etika politik dalam Fiqh Siyasah memiliki arti berlandaskan

dasar Al-Qur'an dan Hadits. Pada akhirnya, menurut Mahfud MD berpolitik yang berlandaskan dengan Pancasila berarti sejalan dengan ajaran Islam, karena nilai-nilai Islam sendiri terkandung di dalam Pancasila.

4. Jurnal Law Review, yang ditulis oleh Thomas Tokan Pureklolon (2020) dengan judul "Pancasila Sebagai Etika Politik dan Hukum Negara Indonesia". Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan interdisipliner. Penelitian ini menemukan bahwasanya Pancasila bukan semata-mata hanya sebagai sumber derivasi peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga sebagai sumber dari moralitas. Hal tersebut mengacu pada sila pertama dan sila kedua dari Pancasila yang menurutnya merupakan sumber atas nilai-nilai moral bagi kehidupan dan kebangsaan dan kenegaraan. Dikatakan juga bahwa kekuasaan kepala negara tidak bersifat mutlak berdasarkan legitimasi religius (teokrasi), melainkan berdasarkan legitimasi hukum dan demokrasi. Oleh karena itu, asas sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" lebih berkaitan dengan legitimasi moral ketimbang bersifat teokrasi.
5. Jurnal Kajian Sosial, Peradaban dan Agama, yang ditulis oleh Achmad Dardiric (2019) dengan judul "Etika Politik Dalam Perspektif Al-Qur'an". Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Penelitian ini mengungkapkan bahwasanya akar masalah dari fenomena kejahatan politik yang terjadi di masyarakat diakibatkan oleh kurangnya fungsi etika dalam politik. Sesuai dengan definisi etika, yakni sebagai parameter dari nilai baik dan buruk seseorang. Etika dipandang penting dalam membentuk karakter pemimpin yang berintegritas baik dan berakuntabilitas yang baik. Etika politik juga memiliki hubungan yang erat dengan nilai-nilai moral dan agama. Oleh karena itu, Al-Qur'an sebagai sumber utama dalam Islam menjadi rujukan utama dalam menggali nilai-nilai, termasuk nilai etika dalam berpolitik.

Beberapa penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwasanya sudah banyak yang membahas tentang konsep etika politik baik ditinjau secara legitimasi hukum (Pancasila) maupun legitimasi religius (agama). Penelitian ini secara khusus akan membahas mengenai konsep yang sama mengenai etika politik, namun yang membedakan dalam penelitian ini adalah etika politik ditinjau dari perspektif Mohammad Natsir dalam konteks politik kontemporer.

## H. Sistematika penulisan

Untuk memahami alur dari penelitian ini, berikut adalah sistematika penulisan dalam penelitian ini yang akan dibagi menjadi lima bab:

1. **BAB I:** Pada Bab I akan dibahas mengenai pendahuluan, mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berpikir, permasalahan utama, hasil penelitian terdahulu, hingga sistematika penulisan.
2. **BAB II:** Pada Bab II akan dibahas mengenai tinjauan pustaka, seperti konsep tentang etika, konsep tentang politik, dan konsep tentang etika politik.
3. **BAB III:** Pada Bab III akan dibahas mengenai metodologi penelitian. Bagian ini berisi tentang pendekatan dan metode penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik dan pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.
4. **BAB IV:** Pada Bab IV akan dibahas mengenai pokok permasalahan utama dalam penelitian ini, yakni tentang ideologi politik M. Natsir, prinsip-prinsip moral dan aktivitas politik Natsir, dan konsep kewajiban dan tanggung jawab politik Natsir.
5. **BAB V:** Pada Bab V akan dijelaskan mengenai hasil kesimpulan dalam penelitian ini. Berikut juga dengan saran-saran dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya mengenai topik etika politik M. Natsir.